

POLIGAMI LEBIH DARI EMPAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

DYAH SEPTARI MARITO SIREGAR

ABSTRACT

Polygamy is as marriage between a man and two or more women (four women in maximum); it has legal ground in the Islamic law. The study used judicial normative and descriptive methods. The result of the study showed that the implementation of polygamy in the Islamic society is violated since many men have more than four wives, and it is contrary to the provisions in the Islamic Fiqh, KHI (Compilation of the Islamic laws), and Law No. 1/1974 on Marriage . Its legal consequence is that the marriage is considered as adultery or an illegitimate marriage. Children who are born from polygamy of more than four wives are also considered as illegitimate children. They do not have any nasab (lineage) with their father or his descendant although they become the responsibility of their biological parents.

Keywords: Marriage, Polygamy, Fiqh, UUP (Marriage Law)

I. Pendahuluan

Islam adalah ajaran yang diturunkan Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dengan teliti, tanpa ada celah dan cacat, bahkan dalam menciptakan langit dan bumi tersebut tidak ada keberatan sedikitpun pada-Nya. Islam yang turun diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah ajaran yang sempurna tiada kekurangan, kebatilan, bahkan tiada keraguan sama sekali. Islam juga ajaran yang memberikan kemudahan, solusi bukan membuat masalah dan memberikan kesengsaraan.¹

Perkawinan bertujuan untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang. Perkawinan dalam Islam berada di ruang publik/sosial, dikarenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan dalam Islam berada di ruang moral keagamaan, karena setiap pasangan dalam perkawinan

¹ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?* (Jakarta : Jakarta Mumtaz, 2006), hlm. 9-10

memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan.²

Poligami adalah suatu tindakan yang sampai saat ini menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat. Sebagian mereka banyak yang menganggap kalau poligami itu merupakan suatu perbuatan negatif. Padahal pada hakekatnya poligami itu diperbolehkan dalam Islam, hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami di sisi lain salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Ironisnya, kedua kecenderungan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga dalam para aktivis dakwah yang memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang yang mengatur perkawinan termasuk didalamnya mengatur tentang beristri lebih dari satu atau poligami. Kebolehan poligami di UUP terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya seorang suami dan (2) Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Di Indonesia pengaturan tentang poligami diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “Apabila ingin beristri lebih dari satu maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri:
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan:

² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 111

3. Isteri tidak dapat
melahirkan keturunan:

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 tentang beristri lebih dari seorang di jelaskan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Perbuatan Poligami lebih dari empat istri yang dilakukan Eyang Subur ini mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan Fatwa No. 17 Tahun 2013 tentang beristeri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan tersebut merupakan keputusan berdasarkan dalil-dalil yang telah ada dalam Al-Quran dan juga hadits. Berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan MUI, seharusnya Eyang Subur melepaskan (menceraikan) empat istri dari delapan istrinya karena menurut ulama hubungan yang telah terjalin antara Eyang Subur dan isteri-isterinya yang ke lima dan seterusnya adalah dihukumi zinah karena statusnya adalah bukan suami isteri.

Adapun Fatwa MUI No. 17 tahun 2013 berbunyi bahwa beristri lebih dari empat wanita pada waktu yang bersamaan hukumnya haram. MUI menetapkan, jika pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, maka ia sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedang wanita yang kelima dan seterusnya, meski secara kenyataan sudah digauli, statusnya bukan menjadi istri yang sah. Wanita yang kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Seorang muslim yang telah melakukan pernikahan (beristri lebih dari empat dalam waktu bersamaan) harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, berkomitmen untuk melakukan taubat yang sungguh-sungguh dengan jalan: membaca istighfar, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan haram tersebut, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Selanjutnya, melepaskan wanita yang selama ini berkedudukan sebagai istri kelima dan seterusnya (mutarakah). Memberikan biaya terhadap wanita-wanita yang telah digauli beserta anak-anaknya yang lahir akibat pembuahannya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Jika terjadi pernikahan (beristri lebih dari empat), dan yang bersangkutan tidak mau menempuh langkah yang dihimbau MUI, maka pemerintah harus

mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk melepaskan wanita yang tidak sah sebagai istrinya melalui peradilan agama (*tafriq al-qadhi*).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dibahas secara lebih mendalam dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang poligami dalam perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah legalitas status perkawinan poligami yang melebihi dari empat orang menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apa akibat hukum dari poligami yang melebihi dari empat orang menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan poligami dalam perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status poligami yang melebihi dari empat orang menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari poligami yang melebihi dari empat orang menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum adalah : Al-Qur'an, Hadits, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 17 Tahun 2013, Buku-buku Fiqih Islam

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari hukum primer, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana.

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *alnikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ‘ibarat *'an al-wath wa al-' aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan. Masalah perkawinan dalam Al-Qur'an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan diterangkan secara tafsili/terperinci.³ Pokok-pokok hukum perkawinan dalam Al Qur'an diterangkan dalam lebih dari 8 surat, adapun inti hukum perkawinan dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 221-237 mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena susuan.

Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁴

Di dalam hukum Islam (fiqih) poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan secara

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 1990), hlm. 45

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.

ekonomi mampu untuk menafkahi isteri-isterinya tersebut. Disamping itu poligami di dalam hukum Islam (fiqih) dibatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi oleh seorang suami yakni maksimal 4 (empat) orang isteri. Hal ini berpedoman kepada perjalanan hidup Nabi yang terdapat di dalam hadits bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya memiliki isteri sebanyak 4 (empat) orang. Dengan berpedoman kepada riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW tersebut maka ketentuan tentang jumlah isteri dalam poligami dari seorang suami dibatasi dengan tegas hanya berjumlah 4 (empat) orang. Apabila jumlah isteri dari seorang suami yang berpoligami tersebut melebihi 4 (empat) orang isteri maka isteri kelima, keenam dan seterusnya tersebut wajib diceraikan karena telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam.

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketetuan tentang pengaturan poligami di Indonesia yang dijadikan dasar pelaksanaan perkawinan poligami termuat didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI maupun peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangat optimis dan berkeyakinan bahwa prospek poligami itu semakin baik, dan terbuka kemungkinan berpoligami bagi yang berkemampuan dan memiliki niat yang ikhlas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu poligami di dalam hukum perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan pengaturan yang jelas sehingga dapat dilaksanakan bagi yang berkemampuan dan memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

Proses selanjutnya kemudian lahir Instruksi Presiden No.1 /1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No.154/1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No.1 /1991 tanggal 10 Juni 1991. Isi kompilasi tersebut khususnya dalam persoalan poligami , tidak ada hal yang dianggap lebih mempersulit dari pada peraturan-peraturan sebelumnya. Kemudian yang menarik diperhatikan adalah salah satu persyaratan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan isteri, dalam pasal 59 KHI disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa, mendengar isteri yang bersangkutan di Pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum poligami telah dikenal pada berbagai bangsa baik sebelum Islam, maupun setelah datangnya Islam. namun diketahui bahwa poligami sebelum Islam itu tanpa batas, sedangkan

⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam R.I, *Alasan Syar'ī Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : tp., 1998), hlm. 48

poligami dalam Islam ada jumlah atau batasnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakat yang terkebelakang. Bahkan banyak kalangan berpendapat bahwa poligami berkembang seiring dengan laju perkembangan budaya dan peradaban suatu masyarakat.

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami.⁶ Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat. Tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan itu berdasarkan surat An-Nisa (4) ayat 3.⁷ Ayat ini memberikan beberapa batasan. *Pertama*, batas maksimal empat istri dan *kedua*, hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami. Disamping syarat formal dari Allah sebagaimana tersebut, syarat yang tidak dapat diabaikan adalah kemampuan untuk membiayai (*nafaqah*) istri-istri tersebut.

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Walaupun mereka berbeda

⁶ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84

⁷ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana, 2006). hlm. 176

pendapat dalam menentukan jumlah dan kadarnya. Adapun tentang kewajiban suami dalam bentuk nonmateri kelihatannya ulama tidak mensyaratkan, karena yang demikian itu tidak terukur dan tidak mungkin pula melakukan penyamaan dalam sesuatu yang tidak terukur. Suami tidak akan mampu berbuat adil dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan Allah dalam ayat 129 surat an-Nisa (4).

Atas dasar ini, keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang di antara para istrinya sesuai dengan kemampuannya, yaitu dalam hal bermalam atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain; bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang yang memang berada di luar kemampuan manusia.

Dengan demikian, hukum perkawinan yang ditetapkan Islam mengakui bahwa monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, tetapi bersamaan dengan itu membolehkan pula poligami, karena hal tersebut perlu diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat.⁸

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UUP dan KHI. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.⁹

Untuk perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka undang-undang memandang bahwa perkawinan tersebut tidak sah apabila tidak dicatatkan. Akibat hukumnya adalah kedudukan isteri dari perkawinan yang tidak sah tersebut menjadi lemah secara hukum, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dipandang sebagai anak-anak luar kawin. Mengenai anak-anak luar kawin yang dihasilkan dari perkawinan yang

⁸ Nawawi, Rif'at Syauqi Nawawi. *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami*, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A.Hafiz Anshary. (ed) . (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 120

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 171.

tidak sah tersebut maka anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu dan teknologi bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya maka anak tersebut dipandang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan kedudukan isteri menjadi lemah di dalam hukum khususnya dibidang hak-hak isteri dalam memperoleh nafkah dari suaminya. Di samping itu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut di pandang sebagai anak-anak luar kawin yang apabila tidak dapat dibuktikan secara ilmu dan teknologi anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan anaknya maka anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan demikian maka anak tersebut tidak memiliki hak mewaris dari harta ayahnya dan keluarga ayahnya.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang poligami dalam fiqih Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 3 dan Surat An-Nisa 129 serta di dalam Hadist HR. Ahmad dan pengaturan poligami di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pasal 3, 4, dan 5 dengan ketentuan bahwa perkawinan poligami yang melebihi dari empat orang isteri bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan tersebut dipandang tidak sah secara hukum. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam poligami diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan 59 yaitu beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri serta mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya memperoleh ijin dari Pengadilan Agama. Apabila perkawinan poligami tersebut lebih dari empat orang isteri maka perkawinan tersebut tidak sah.

2. Status perkawinan poligami melebihi dari empat orang isteri :

Pertama, Menurut Fiqih Islam tidak sah dan dipandang sebagai suatu perbuatan zinah berdasarkan Al-Qur'an An-Nisa (3) dan (129), hadist HR. Ahmad. Mayoritas ulama (Jumhur Ulama) berpendapat bahwa seorang pria muslim yang mempunyai isteri lebih dari empat orang maka ia wajib membebaskan / menceraikan isterinya yang kelima, keenam dan seterusnya. Hal ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat An-Nisa 3 dan Surat an-Nisa 129 dan juga hadist Ghaylan bin Salmah memeluk Islam sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Peliharalah empat diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya". Dimana Rasulullah SAW, "Peliharalah empat diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya".

Kedua, Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2), Pasal (4), Pasal (5), poligami dapat dilaksanakan dengan persyaratan tertentu dan apabila poligami lebih dari empat orang istri maka bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan status hukum perkawinan poligami yang kelima dan seterusnya tersebut adalah tidak sah.

3. Poligami yang melebihi dari empat orang isteri menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah akan menimbulkan akibat *pertama*, sepanjang anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami dari isteri satu sampai keempat adalah anak sah dan bernasab pada ayahnya. Namun bagi anak yang dilahirkan dari isteri kelima dan seterusnya pada perkawinan poligami maka anak tersebut tidak sah dan hanya bernasab pada ibunya. *Kedua* yang terkait dengan harta perkawinan dari perkawinan kelima dan seterusnya maka isteri tidak berhak atas harta dari suaminya. *Ketiga* tanggung jawab terhadap nafkah anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami kelima dan seterusnya maka tanggung jawab nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konsistusi No. 46/PUU-VIII/2010 sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya. *Keempat* mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari poligami kelima dan

seterusnya maka anak tersebut tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. *Kelima*, akibat hukum dari perkawinan poligami yng lebih dari empat orang isteri dipandang sebagai suatu perbuatan zina, sehingga dapat dipidana berdasarkan delik pidana berdasarkan Pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 (Sembilan) bulan.

B. Saran

1. pihak perempuan pada khususnya tidak dirugikan hak-haknya dalam pelaksanaan poligami. Setiap pelaksanaan poligami hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, dengan memperoleh ijin dari Pengadilan Agama dan perkawinan poligami tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Diharapkan agar para ustadz/ulama lebih menekankan dalam dakwah dan syiar agama islam dengan mengajak masyarakat untuk bisa lebih berpikir positif dalam menyikapi kehidupan perkawinan keluarga Islami dan membuka nurani untuk dapat mengerti dan menghormati perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar tidak terjadi pelecehan dan sikap meremehkan terhadap perkawinan.
3. Para suami yang memiliki isteri lebih dari empat dalam berpoligami hendaknya mengikuti ketentuan yang termuat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (3) dan (129) serta dalam hadist HR. Ahmad serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan.

V. Daftar Pustaka

- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2006
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam R.I, *Alasan Syari Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : tp., 1998
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta : LKIS, 2003

Faqih, Khozin Abu, *Poligami Solusi atau Masalah?* Jakarta : Jakarta Mumtaz, 2006

Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

Nawawi, Rif'at Syauqi. *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami*, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A.Hafiz Anshary. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bina Aksara, 1990

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998